



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HARIYANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 66509

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/180 m² di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/120 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 86 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 41.050.000

1. LAINNYA, FEDERAL SILVER FOX SEPEDA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, HONDA LX Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
4. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.230.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 66.373.369**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 601.653.369

III. HUTANG Rp. 8.886.685



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

592.766.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.